

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah sehingga terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dan dimungkinkannya akses ke semua wilayah (*Tamin, 2000*). Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*). Dalam kegiatannya, transportasi diharuskan menjadi satu kesatuan sistem transportasi.

Sistem transportasi adalah bentuk dari suatu keterikatan dan keterkaitan antara beberapa objek yang berinteraksi guna menjalankan perpindahan orang dan atau barang. Tujuannya adalah terciptanya koordinasi dalam proses perpindahan tersebut dengan mengatur komponen yang berada di dalamnya. Penataan sistem transportasi juga diperlukan secara terstruktur dan sistematis sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional yang mampu mewujudkan transportasi yang saling terintegrasi, terjangkau, nyaman, aman, dan selamat bagi masyarakat.

Kabupaten Bangka Barat berada di Pulau Bangka dengan total luas wilayah lebih kurang 2.884,15 km². Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 adalah sebanyak 206.246 jiwa. Adapun pertumbuhan penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah sebesar 0,99% terhadap tahun sebelumnya (*BPS Kabupaten Bangka Barat 2022 dalam RKPD Bangka Barat tahun 2023*). Berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan, pada tahun 2041 penduduk Kabupaten Bangka Barat meningkat dari 206. 246 jiwa (tahun 2021) menjadi 290.875 jiwa. Proyeksi tersebut menggunakan data jumlah penduduk dari tahun 2010 hingga 2021. Laju pertumbuhan penduduk dari 2010-2021 adalah 1,73%.

Sementara itu, mobilisasi penduduk yang kian meningkat ini 99% diakomodasi oleh kendaraan pribadi (*Tim PKL Bangka Barat, 2023*). Usaha untuk mengimbangi atau menekan laju kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi

adalah dilakukannya perbaikan angkutan umum (*Yordan Azharuly*). Berdasarkan *survey stated preference*, masyarakat kabupaten Bangka Barat 70% memiliki minat pindah menggunakan angkutan umum dengan syarat adanya perbaikan dari kinerja trayek.

Kabupaten Bangka Barat memiliki dua trayek angkutan pedesaan. Angkutan pedesaan tersebut sudah memiliki izin usaha, tetapi belum memiliki izin trayek. Berdasarkan *laporan umum Tim PKL Kabupaten Bangka Barat tahun 2023*, nisbah pelayanan angkutan umum pedesaan hanya 5% dan ketersediaan angkutan umum di 6 zona belum terlayani. Tingkat tumpang tindih trayek juga mencapai 51,95%. Load factor hanya 17% dan 23%, panjang trayek belum ideal, waktu tempuh perjalanan lebih dari 2,5 jam, dan umum kendaraan mencapai 20 tahun. Indikator kinerja operasional tersebut belum memenuhi standar SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 tahun 2002 dan SPM LLAJ tahun 2001.

Pemerintah wajib menyediakan angkutan umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 158, yakni "Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum". Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten/kota yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan (*PM No. 15 Tahun 2019*). Namun, angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat saja belum memiliki legalitas berupa SK trayek dari pemerintah setempat.

Dari permasalahan angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja angkutan pedesaan. Evaluasi kinerja angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat ini dilakukan melalui penataan jaringan trayek angkutan pedesaan sesuai dengan permintaan pengguna jasa angkutan pedesaan di wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk melahirkan pengoperasian angkutan umum yang efektif dan efisien. Dari uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Bangka Barat"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat memiliki masalah sebagai berikut:

1. Nisbah pelayanan angkutan pedesaan hanya 5% dan ketersediaan angkutan umum pedesaan di enam zona masih belum terlayani;
2. Indikator kinerja operasional belum memenuhi standar SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 tahun 2002 dan SPM LLAJ tahun 2001;
3. Mobilitas pergerakan masyarakat kabupaten Bangka Barat masih menggunakan kendaraan pribadi dengan proporsi penggunaan kendaraan pribadi sebesar 99%;
4. Tingkat tumpang tindih trayek mencapai 51,95%;
5. Umur kendaraan tidak sesuai dengan PM Nomor 98 tahun 2013 karena lebih dari 15 tahun;
6. Jenis armada angkutan pedesaan belum sesuai dengan kebutuhan dilihat dari jumlah *load factor* yang hanya 23% dan 17%;
7. Belum ada SK trayek yang mengatur angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan permasalahan di atas, dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting kinerja angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat?
2. Bagaimana *demand* angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat?
3. Bagaimana cara menentukan rute angkutan pedesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
4. Apa jenis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat?
5. Bagaimana kinerja jaringan dan kinerja operasional trayek usulan angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat?

6. Berapa besaran tarif rencana yang harus dibebankan kepada masyarakat apabila angkutan umum pedesaan dioperasikan di kabupaten Bangka Barat?

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian dengan meningkatkan kinerja angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menjabarkan kondisi eksisting kinerja angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat;
2. Menghitung *demand* angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat;
3. Menentukan rute angkutan pedesaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Menentukan jenis kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat;
5. Melakukan analisis terhadap kinerja jaringan dan kinerja operasional trayek usulan angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat;
6. Menghitung besaran tarif rencana yang akan diterapkan ketika angkutan umum pedesaan dioperasikan.

1.5. Ruang Lingkup

Untuk mencapai fokus dari penelitian, perlu adanya pembatasan atau cakupan penelitian agar pembahasan tidak menyimpang dari sasaran penelitian yang akan dituju. Berikut ini adalah batasan masalah dari penelitian yang akan dikaji:

1. Wilayah studi meliputi wilayah administrasi di Kabupaten Bangka Barat;
2. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja jaringan dan kinerja operasional angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat;
3. Penataan jaringan trayek angkutan pedesaan meliputi: jumlah permintaan, penentuan rute, dan jenis kendaraan;
4. Analisis kinerja jaringan dan kinerja operasional trayek usulan angkutan pedesaan di Kabupaten Bangka Barat;
5. Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan perhitungan tarif trayek rencana angkutan umum pedesaan di kabupaten Bangka Barat.